

Tinjauan Kritis Kebijakan Pemberantasan Premanisme dan Pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas

Alaini¹, Sofyatul Widad²

^{1,2} Universitas Pamulang, Email : dosen03201@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of government policies in combating thuggery and illegal levies, which frequently occur in the Cikupa Mas Industrial Park. This phenomenon not only disrupts public security and order but also has implications for the investment climate and economic productivity in the industrial area. The main distinction of this study compared to previous research lies in its specific focus on the Cikupa Mas Industrial Zone, which has not yet been the subject of extensive academic study. Most previous studies have tended to highlight thuggery in an urban context or within the transportation sector, whereas this study seeks to uncover the unique social, economic, and institutional dynamics within an industrial setting. The research findings indicate that although anti-thuggery policies have been implemented through law enforcement operations and the formation of an integrated task force—the Anti-Thuggery Task Force—their effectiveness remains limited due to weak interagency coordination, a lack of sustained oversight, and social resistance from certain groups that benefit from these illegal practices. This study recommends the need to reformulate policies by strengthening synergy among local governments, law enforcement agencies, and industrial zone management, accompanied by a social approach based on community empowerment. Efforts to eradicate thuggery and illegal levies can be transformed from merely repressive measures into sustainable, preventive, and participatory policies.

Keywords: *policies to combat thuggery, extortion, and illegal fees; industrial zones*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik premanisme dan pungutan liar yang kerap terjadi di kawasan Industri Cikupa Mas. Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi dan produktivitas ekonomi di wilayah industri. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Kawasan Industri Cikupa Mas, yang hingga kini belum banyak menjadi objek kajian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroiti premanisme dalam konteks perkotaan atau sektor transportasi, sementara studi ini berupaya mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang khas di lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemberantasan telah dijalankan melalui operasi penegakan hukum dan pembentukan tim terpadu, Satgas anti premanisme, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan berkelanjutan, serta adanya resistensi sosial dari kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak manajemen kawasan industri, disertai pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberantasan premanisme dan pungutan liar dapat bertransformasi dari sekadar tindakan represif menuju kebijakan preventif dan partisipatif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan pemberantasan, premanisme, pungli, kawasan industri

PENDAHULUAN

Kawasan Industri Cikupa Mas di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan industri yang berperan strategis dalam perekonomian Provinsi Banten. Kawasan ini menjadi pusat

*) **Alaini et.al** : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

aktivitas ratusan perusahaan manufaktur berskala nasional maupun internasional yang menyerap ribuan tenaga kerja. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, muncul berbagai persoalan sosial seperti praktik pungutan liar pada jalur distribusi logistik terbukti menambah beban biaya operasional dan mengganggu kelancaran transportasi barang menuju kawasan industri (Atmadji & Fajar, 2024). di bidang Ketenagakerjaan juga sangat merugikan masyarakat dan perusahaan di sekitar kawasan cikupa mas karena perecrutan karyawan baru di kuasai oleh premanisme dan politik desa jadi setiap orang mau bekerja harus bayar dengan jumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya, agar bisa di kirim mengikuti tes kerja di PT di kawasan cikupa mas dengan keterlibatan politik desa dan ormas setiap orang yang pengen masuk dikawasan Cikupa mas harus bayar jika perusahaan mengadakan perecrutan karyawan baru tapi tidak ngasih jatah perecrutan ke lingkungan sekitar melalui desa dan ormas, maka PT Terebut akan di datangi oleh sejumlah preman yang bikin ribut (Demo) di depan perusahaan, karena keamanan lingkungan yang dikendalikan oleh kelompok tertentu, hingga lemahnya kontrol kelembagaan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan celah kebijakan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menjadikan Cikupa Mas sebagai contoh konkret dari kompleksitas masalah keamanan di kawasan industri modern. Berdasarkan paparan fakta tersebut diatas, bahwa penegakan hukum dalam praktik pungutan liar dalam pelayanan publik sangat meresahkan, merugikan masyarakat dan merusak wibawa pemerintah, membutuhkan landasan normatif atau undang-nudang khusus untuk memberantasnya (Saputra et al., 2023).

Fenomena premanisme dan pungli di kawasan industri sering kali muncul akibat interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan kelemahan institusional. Banyak kelompok masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal akhirnya membentuk jaringan informal yang memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal. Selain itu, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat turut memperparah situasi. Dalam konteks ini, premanisme bukan hanya masalah kriminalitas, melainkan juga mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan lokal dalam menciptakan ekosistem industri yang aman dan transparan (Nurdin et al., 2025).

Premanisme dan pungutan liar (pungli) merupakan dua fenomena sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi yang padat seperti kawasan industri. Keberadaan praktik-praktik tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap iklim investasi, efisiensi produksi, serta citra daerah sebagai tujuan investasi. Di tengah upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, tindakan premanisme dan pungli justru menjadi penghambat serius yang menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah (Meilenia & Sari, 2025).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan praktik premanisme dan pungli, seperti pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) berdasarkan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016). Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut sering menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi sosial, dan lemahnya tindak lanjut

*) **Alaini et.al** : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

hukum terhadap pelaku. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak berjalan optimal, sehingga berbagai kasus pungli masih terus bermunculan, termasuk di kawasan industri strategis seperti Cikupa Mas.

Kabupaten Tangerang sendiri dikenal sebagai wilayah dengan tingkat industrialisasi yang tinggi. Seiring dengan perkembangan kawasan industri, muncul pula berbagai tantangan baru dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban. Data dari laporan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan dari investor dan pengusaha terkait dengan adanya tekanan dari kelompok tertentu yang menuntut uang keamanan atau melakukan intervensi dalam kegiatan distribusi barang. Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga mengganggu rantai pasok nasional yang bergantung pada kawasan industri Tangerang.

Secara teoretis, kebijakan publik yang efektif seharusnya mampu meminimalkan perilaku menyimpang seperti pungli dan premanisme melalui kombinasi pendekatan struktural dan kultural. Namun, kenyataannya, implementasi kebijakan pemberantasan sering kali terjebak pada pendekatan represif semata tanpa menyentuh akar masalahnya. Dalam konteks Cikupa Mas, keberlanjutan masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya berhasil mengubah pola perilaku sosial-ekonomi masyarakat sekitar maupun aktor-aktor di dalam kawasan industri.

Dalam tinjauan literatur, sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu premanisme dan pungli di berbagai daerah. Misalnya, Wali et al (2026) meneliti praktik pungli di kawasan industri Jabodetabek dan menemukan bahwa lemahnya pengawasan serta rendahnya transparansi menjadi faktor utama yang memicu pelanggaran. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti efektivitas kebijakan pemberantasan secara spesifik pada konteks daerah tertentu yang memiliki karakter sosial ekonomi berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah secara kritis kebijakan pemberantasan premanisme dan pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas yang memiliki karakteristik unik.

Keunikan kawasan industri Cikupa Mas terletak pada struktur sosial-ekonomi masyarakat sekitar yang heterogen, terdiri dari pendatang dan warga lokal dengan tingkat pendidikan yang beragam. Kondisi ini menciptakan kompleksitas sosial tersendiri yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan manajemen kawasan sering kali tidak berjalan harmonis akibat perbedaan kepentingan dan persepsi terhadap masalah keamanan industri. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Cikupa Mas sebagai lokasi strategis untuk meneliti efektivitas kebijakan pemberantasan premanisme secara lebih mendalam.

Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas suatu program pemberantasan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya. Proses implementasi melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat industri. Jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka kebijakan yang dirancang dengan baik pun akan kehilangan daya gunanya. Dalam hal ini, penelitian terhadap implementasi kebijakan di Cikupa Mas dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana kebijakan nasional dapat bekerja efektif di tingkat lokal.

*) **Alaini et.al** : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

Premanisme di kawasan industri bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan sosial bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Banyak perusahaan yang terpaksa meningkatkan biaya keamanan secara mandiri karena tidak percaya terhadap perlindungan yang disediakan oleh aparat. Akibatnya, beban operasional perusahaan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing industri nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan premanisme dan pungli bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan kebijakan ekonomi dan tata kelola industri (Mahendra et al., 2025).

Pendekatan kritis dalam penelitian ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam ketidaksesuaian antara idealitas kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Melalui perspektif ini, penelitian tidak hanya menilai apakah kebijakan berjalan atau tidak, tetapi juga mengungkap faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya deviasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan akar persoalan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih solutif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini berupaya menelaah hubungan antara dimensi hukum, politik, dan sosial dalam kebijakan pemberantasan premanisme. Dalam banyak kasus, keberadaan preman sering kali memiliki hubungan tidak langsung dengan aktor-aktor politik lokal yang memanfaatkan jaringan informal untuk menjaga pengaruhnya. Hal ini menyebabkan kebijakan pemberantasan tidak berjalan efektif karena terdapat kepentingan yang saling bertentangan di tingkat lokal. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya melihat peraturan secara normatif, tetapi juga menganalisis konteks kekuasaan yang melingkupinya.

Dalam konteks Kabupaten Tangerang, upaya pemberantasan premanisme dan pungli sering kali dilakukan melalui operasi gabungan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Namun, tanpa dukungan sistem pengawasan dan pemberdayaan masyarakat, hasilnya cenderung bersifat sementara. Banyak pelaku yang kembali melakukan aktivitasnya setelah operasi selesai, karena tidak ada mekanisme reintegrasi sosial maupun sanksi yang memberikan efek jera. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat top-down belum cukup efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku industri.

Kelemahan lain yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan sumber daya dan alokasi anggaran. Dalam banyak kasus, kebijakan pemberantasan dijalankan tanpa evaluasi kinerja yang jelas, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku industri juga tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh keberadaan premanisme. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan premanisme tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma kebijakan publik itu sendiri. Pemerintah perlu beralih dari pendekatan penindakan semata menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, aparat, dan masyarakat sekitar, kebijakan akan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dan peluang keberhasilan yang lebih besar.

*) **Alaini et.al** : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

Kawasan Industri Cikupa Mas juga menarik untuk diteliti karena posisinya sebagai simpul penting dalam rantai distribusi logistik nasional. Gangguan keamanan di kawasan ini dapat berdampak langsung pada keterlambatan distribusi bahan baku dan produk jadi. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas kebijakan pemberantasan premanisme di Cikupa Mas memiliki relevansi strategis bagi kebijakan industri dan ekonomi nasional yang lebih luas.

Secara empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan nasional berinteraksi dengan realitas lokal. Hal ini penting mengingat kebijakan yang dirumuskan secara top-down sering kali gagal ketika diterapkan di daerah yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, studi di Cikupa Mas dapat menjadi contoh untuk merumuskan kebijakan pemberantasan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal.

Dari segi akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan tata kelola industri. Dengan memadukan perspektif hukum, sosial, dan administrasi publik, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif tentang hubungan antara kebijakan, implementasi, dan hasil kebijakan. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai praktik kebijakan pemberantasan premanisme di kawasan industri. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan manajemen kawasan industri di Indonesia. Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pemberantasan premanisme dan pungutan liar di Kawasan Industri Cikupa Mas Kabupaten Tangerang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemberantasan premanisme dan pungutan liar di kawasan tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian Empiris. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni melakukan telaah kritis terhadap kebijakan pemberantasan premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang. Pendekatan kualitatif relevan karena memungkinkan peneliti mengungkap makna, perspektif, dan praktik yang terjadi di lapangan, sekaligus menilai kesesuaian kebijakan dengan implementasi aktual.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi **analisis kebijakan publik** dengan memadukan perspektif hukum, kriminologi, dan sosiologi. Analisis ini bertujuan menilai efektivitas kebijakan yang ada, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016), serta regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi dan premanisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan kritik akademik dan rekomendasi berbasis temuan empiris. Lokasi penelitian ditetapkan di Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, karena wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan

*) **Alaini et.al** : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

industri manufaktur yang kompleks. Berdasarkan data awal, kawasan ini juga kerap dilaporkan mengalami praktik premanisme maupun pungli yang berdampak pada distribusi logistik dan keamanan usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemberantasan premanisme dan pungutan liar (pungli) di Kawasan Industri Cikupa Mas Kabupaten Tangerang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan industri yang berkontribusi besar terhadap perekonomian regional. Namun, efektivitas kebijakan yang ada perlu dikaji secara kritis karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik premanisme masih berlangsung dan bahkan mengalami adaptasi terhadap pola penindakan aparat. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara perumusan kebijakan dan implementasinya. Dalam konteks Cikupa Mas, kelompok-kelompok informal yang menguasai jalur logistik dan penyaluran tenaga kerja menunjukkan bahwa kebijakan formal tidak mampu memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, kajian kritis ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar mampu menekan praktik ilegal serta mengidentifikasi kendala struktural yang menghambat keberhasilannya.

Secara normatif, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016) (Saber Pungli) sebagai upaya terpusat untuk memberantas pungutan liar di berbagai sektor. Di tingkat lokal, Kabupaten Tangerang juga memiliki beberapa regulasi pendukung berupa instruksi bupati dan kebijakan internal satuan keamanan kawasan industri. Meskipun demikian, kebijakan ini tampak belum memiliki pengaruh signifikan dalam menghilangkan pungli, terutama di titik-titik rawan seperti pintu masuk kawasan industri, jalur distribusi barang, serta fasilitas bongkar-muat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan masih bersifat administratif dan tidak memperhitungkan dinamika sosial yang mendukung keberlangsungan praktik premanisme.

Efektivitas kebijakan pemberantasan premanisme tidak dapat dilepaskan dari kesiapan aparat dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara konsisten. Di Cikupa Mas, meskipun sudah ada operasi gabungan, masih ditemukan celah pengawasan yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk tetap melakukan aktivitas pungli dengan modus yang lebih halus. Ada kasus di mana pungli dikemas sebagai “uang keamanan,” “uang kebersihan,” atau “biaya akses area,” sehingga sulit dibuktikan secara hukum.

*) **Alaini et.al** : Corresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku premanisme memiliki kemampuan adaptasi terhadap kebijakan yang bersifat represif. Kebijakan yang hanya fokus pada penindakan sementara tanpa sistem pengawasan berkelanjutan sulit memberikan dampak jangka panjang.

Selain aparat, pihak manajemen kawasan dan perusahaan juga memainkan peran penting dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Namun, banyak perusahaan yang lebih memilih cara praktis, yaitu “membayar saja” demi memperlancar distribusi logistik daripada melapor kepada aparat. Sikap ini justru memperkuat posisi pelaku premanisme karena memberikan ruang keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Dalam perspektif kebijakan publik, faktor ini menunjukkan adanya permasalahan perilaku kolektif di mana pelaku usaha tidak memiliki insentif yang kuat untuk mendukung pemberantasan pungli. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun sistem hukum sudah tersedia.

Kritik lain terhadap kebijakan pemberantasan premanisme adalah lemahnya koordinasi antar lembaga. Meski Saber Pungli merupakan satuan tugas lintas instansi, implementasinya sering berjalan secara sektoral. Aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri sering memiliki persepsi yang berbeda mengenai prioritas keamanan. Perbedaan persepsi ini mengakibatkan lambatnya respons terhadap kasus yang terjadi serta ketidaksinkronan tindakan di lapangan. Tidak jarang terjadi situasi di mana laporan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti karena terbentur prosedur birokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi sistem pelaporan dan tindakan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Dari perspektif sosiologis, premanisme di kawasan industri tidak hanya berakar pada motif ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang terbentuk dari interaksi masyarakat dengan lingkungan industri. Kehadiran para pendatang yang bekerja di industri serta masyarakat lokal yang tidak terserap dalam lapangan kerja formal menciptakan ketimpangan sosial yang menjadi lahan subur bagi praktik informal seperti pungli. Kebijakan pemberantasan yang hanya menekankan aspek hukum tanpa memahami faktor sosial semacam ini tidak akan menghilangkan akar persoalan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan harus diukur berdasarkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor sosial tersebut.

Selain faktor ekonomi dan kelembagaan, budaya hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak pekerja maupun sopir logistik merasa bahwa pungli adalah bagian dari “kebiasaan” atau “biaya operasional yang wajar.” Normalisasi seperti ini membuat

*) **Alaini et.al** : Corresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

kebijakan pemberantasan menjadi sulit ditegakkan karena masyarakat sendiri tidak melihat praktik tersebut sebagai sesuatu yang merugikan. Budaya hukum yang lemah ini semakin memperburuk situasi ketika aparat atau pihak keamanan internal kawasan ikut terlibat dalam praktik tersebut. Tanpa perubahan budaya hukum, pemberantasan premanisme akan selalu mengalami hambatan.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan, terlihat bahwa kebijakan belum sepenuhnya menyentuh aspek empowering masyarakat dan pekerja industri. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam governance modern. Kebijakan yang efektif harus menciptakan mekanisme di mana masyarakat merasa aman dan percaya diri untuk melaporkan pungli tanpa takut balas dendam. Namun, di Cikupa Mas, mekanisme pelaporan ini belum optimal. Banyak pekerja merasa takut melapor karena khawatir akan terjadi intimidasi atau gangguan dalam aktivitas kerja mereka. Ini menunjukkan perlunya sistem perlindungan pelapor (whistleblower system) yang lebih kuat.

Evaluasi kebijakan juga menunjukkan bahwa minimnya data kasus yang didokumentasikan menyebabkan kebijakan sulit dievaluasi secara objektif. Banyak kasus pungli yang terjadi secara sporadis dan tidak tercatat secara formal. Tanpa data yang akurat, pemerintah tidak memiliki alat evaluasi untuk menilai efektivitas operasi penertiban. Selain itu, tidak adanya indikator kinerja khusus membuat kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemberantasan tidak hanya membutuhkan tindakan fisik, tetapi juga sistem evaluasi berbasis data.

Penting untuk dicatat bahwa lingkungan industri memiliki dinamika ekonomi yang cepat, sehingga kebijakan pemberantasan harus responsif dan adaptif. Namun, kebijakan yang berlaku masih bersifat statis dan tidak mengikuti perkembangan pola premanisme modern. Modus pungli semakin tersamarkan, seperti menggunakan organisasi kemasyarakatan tertentu sebagai tameng legalitas. Ketika hukum tidak mampu mengimbangi kecepatan adaptasi pelaku, kebijakan tidak akan mencapai sasarannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk menangani modus-modus baru tersebut.

Secara kelembagaan, aparat keamanan di Cikupa Mas dinilai masih kurang dalam hal jumlah personel maupun kapasitas penegakan hukum. Dengan luas kawasan industri dan tingginya aktivitas logistik, jumlah petugas yang ada tidak cukup untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Kondisi ini diperburuk oleh shift kerja yang tidak seimbang dan terbatasnya sarana operasional. Kelemahan

*) **Alaini et.al** : Corresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

kapasitas ini membuat pelaku premanisme memiliki peluang besar untuk melakukan kegiatan ilegal tanpa terdeteksi. Situasi ini jelas menghambat efektivitas kebijakan pemberantasan.

Hambatan lain yang perlu dikritisi adalah faktor politik lokal yang memiliki pengaruh kuat terhadap kerja aparat. Di beberapa kasus, kelompok tertentu yang melakukan kegiatan pungli memiliki kedekatan dengan tokoh politik atau pejabat lokal, sehingga aparat menjadi ragu untuk melakukan penindakan secara tegas. Relasi patronase semacam ini merupakan tantangan serius dalam pemberantasan premanisme karena menciptakan dualisme hukum: hukum formal dan hukum informal berbasis kekuasaan. Jika politik lokal tidak direformasi, kebijakan pemberantasan tidak akan berjalan maksimal.

Dari perspektif hukum, aturan yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menjerat pelaku premanisme dan pungli. Namun, implementasinya bergantung pada keseriusan aparat penegak hukum. Banyak kasus pungli di kawasan industri yang tidak dilanjutkan karena dianggap pelanggaran kecil atau sulit dibuktikan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya ditegakkan ketika ada tekanan publik. Padahal, dalam konteks kawasan industri, pungli berdampak besar terhadap iklim investasi dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, interpretasi hukum terhadap pungli harus diperkuat melalui SOP yang lebih jelas dan ketat.

Analisis kebijakan juga menemukan bahwa insentif untuk mendukung kebijakan pemberantasan masih sangat kecil. Pelaku usaha tidak menerima manfaat langsung jika mereka melapor, sementara risiko yang mereka hadapi cukup besar. Pemerintah perlu merancang insentif seperti jaminan perlindungan, penurunan biaya perizinan, atau audit keamanan gratis bagi perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam program anti-pungli. Kebijakan yang tidak memberikan insentif cenderung sulit dijalankan karena tidak mampu menggerakkan aktor-aktor kunci.

Dari sisi ekonomi, pungli memberikan beban tambahan bagi perusahaan, terutama sektor logistik. Setiap pungli yang dibayarkan menambah biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada pelanggan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menurunkan daya saing industri lokal. Kebijakan pemberantasan seharusnya mampu menekan biaya ekonomi tinggi, tetapi dalam praktiknya justru belum memberikan kontribusi signifikan. Ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, bukan hanya jumlah operasi penertiban yang dilakukan.

Kawasan Industri Cikupa Mas sebagai salah satu pusat manufaktur nasional membutuhkan kebijakan pengamanan yang terintegrasi dengan strategi ekonomi. Namun, kebijakan yang berlaku

*) **Alaini et.al** : Corresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

masih terfragmentasi antara aspek keamanan dan aspek ekonomi. Idealnya, kebijakan pemberantasan harus menjadi bagian dari kebijakan industri, tidak berdiri sendiri. Pendekatan integratif ini akan menciptakan sistem keamanan industri yang lebih kuat karena melibatkan semua pemangku kepentingan secara menyeluruh. Tanpa integrasi kebijakan, pemberantasan premanisme akan terus terhambat oleh ketidaksinkronan sektor.

Kritik lain yang perlu diajukan adalah minimnya keterlibatan akademisi dan lembaga riset dalam penyusunan kebijakan. Padahal, kawasan industri seperti Cikupa Mas memiliki dinamika yang kompleks dan membutuhkan analisis berbasis data, teori, dan penelitian empiris. Kebijakan yang tidak melibatkan kajian akademik berpotensi gagal karena tidak mempertimbangkan kompleksitas sosial dan ekonomi yang ada. Pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi atau lembaga riset independen untuk mengevaluasi kebijakan secara periodik.

Dalam konteks implementasi, kebijakan pemberantasan premanisme juga menghadapi hambatan berupa lemahnya sistem koordinasi komunikasi antara aparat, perusahaan, dan masyarakat. Banyak informasi mengenai ancaman keamanan tidak tersampaikan dengan baik karena tidak adanya sistem informasi terintegrasi. Padahal, dalam dunia industri modern, sistem pelaporan berbasis digital sangat penting untuk mempercepat respons. Tanpa dukungan teknologi informasi, kebijakan akan bergerak lambat dan tidak responsif.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah meningkatnya variasi bentuk premanisme yang memanfaatkan teknologi digital, seperti pemalakan melalui akun palsu yang mengancam sopir logistik atau perusahaan melalui pesan daring. Modus baru ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan pemberantasan yang masih berbasis pola konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya modernisasi kebijakan dengan memasukkan aspek keamanan siber dalam penanganan premanisme. Jika tidak segera diadaptasi, pelaku premanisme akan semakin sulit ditindak karena berada di ruang digital yang lebih sulit dilacak.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan kritis ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberantasan premanisme dan pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas belum berjalan efektif karena masih menghadapi hambatan struktural, kultural, politik, dan teknis. Efektivitas kebijakan hanya dapat meningkat jika pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparat,

*) **Alaini et.al** : Corresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id

memperbaiki budaya hukum masyarakat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi. Selain itu, pembaruan regulasi dan penggunaan teknologi informasi menjadi aspek penting dalam mempercepat deteksi dan respons terhadap praktik pungli. Rekomendasi kebijakan harus diarahkan pada solusi yang komprehensif agar kawasan industri dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, transparan, dan berdaya saing tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadji, E., & Fajar, M. B. (2024). Pungutan Liar yang Dihadapi oleh Angkutan Truk: Studi Kasus Angkutan Truk dengan Trayek Serang ke Jabodetabek. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art7>
- Mahendra, G. A., Faseh, L. N., Robbani, M. A., & Mashudi, M. (2025). Dampak Pungutan Liar Oleh Organisasi Masyarakat Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.7291>
- Meilenia, D., & Sari, M. M. K. (2025). Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Pasar Rakyat Jambangan Tentang Praktik Pungutan Liar dalam Tindak Pidana. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 13(3), 291–303. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v13n3.p291-303>
- Nuridin, A., Sartika, N. S., Dasmaran, V., & Nurbani, S. (2025). Preman Politik dan Pasar: Ancaman Keamanan Terhadap Iklim Investasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 354–369. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21933>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016).
- Saputra, B., Hasan, Z., Fajar, D., & Avryandilla, M. R. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 682–693. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219088>
- Wali, A., Neyasyah, M. S., Kosasih, A., Suaka, M., Negara, I. P. E. W., Nugraha, V. P., Nasistiawan, J., Khairazi, R., Wulandari, Septaria, E., Madinar, & Yamani. (2026). *Dinamika Perkembangan Hukum Administrasi Perizinan*. Gita Lentera.

*) Alaini et.al : Coresponding Author : dosen03201@unpam.ac.id